

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT PENGELUARAN
2012 - 2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT PENGELUARAN
2012 - 2016**



<http://pe3.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**

ISBN : 978-602-632-935-6

Nomor Publikasi : 18090.1704

Katalog BPS : 9302003.1809

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 89 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Gambar Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Dicetak Oleh :

CV. Jaya Wijaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Gedong Tataan, September 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran,

Wintarti Dyah Indriani, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	III
Daftar Isi.....	V
Daftar Tabel.....	VII
Daftar Grafik.....	IX
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	7
1.3 Kegunaan Statistik PDRB.....	11
BAB II Metode Estimasi Dan Sumber Data.....	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT).....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	22
2.5 Perubahan Inventori (PI).....	26
2.6 Ekspor - Impor.....	29
BAB III Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pesawaran Berdasarkan PDRB Pengeluaran 2012-2016.....	35
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	37
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	44
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	45
3.2.2. Konsumsi Akhir Lnprt.....	49
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah.....	50
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	52
3.2.5. Perubahan Inventori.....	54
3.2.6. Ekspor Barang Dan Jasa.....	55
3.2.7. Impor Barang Dan Jasa.....	56
BAB IV Perkembangan Agregat PDRB Pengeluaran Kabupaten Pesawaran.....	59
4.1 PDRB (Nominal).....	61

4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	62
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	63
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	63
4.5	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	64
4.6	Perbandingan PDRB Terhadap Impor	65
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan Dan Total Permintaan.....	66
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	67
4.9	Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	68
BAB V Penutup		71
Lampiran.....		75
Daftar Pustaka.....		83

<http://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	38
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	39
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	41
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	43
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	44
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	46
Tabel 7.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	47
Tabel 8.	Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	48
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	49
Tabel 10.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	50
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	51
Tabel 12.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	52
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	53
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	54

Tabel 15.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Pesawaran 2012-2016	55
Tabel 16.	Perkembangan Impor Kabupaten Pesawaran 2012-2016	57
Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	61
Tabel 18.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor , 2012-2016	62
Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2012-2016	63
Tabel 20.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	64
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	65
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	65
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	66
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	67
Tabel 25.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	38
Grafik 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	40
Grafik 3.	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016	40
Grafik 4.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	42
Grafik 5.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2012-2016	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	77
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	78
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	79
Lampiran 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran	80
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	81
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	82
Lampiran 7.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	83
Lampiran 8.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran	84
Lampiran 9.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	85
Lampiran 10.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran	86

BAB I

PENDAHULUAN

<http://pesawarankab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pembangunan ekonomi, pada hakekatnya, merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu penyajian statistik data ekonomi suatu wilayah, di samping statistik lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti

variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

Pengertian PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan akan sama pula

dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini, terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya. Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini, para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Keterkaitan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Model pendekatan PDRB, secara simultan, dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Keterangan:

- | | |
|---|---------------------------------|
| Y (<i>Income</i>) | = PDRB Produksi |
| C (<i>Consumption</i>) | = Konsumsi akhir |
| GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>) | = Pembentukan Modal Tetap Bruto |

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF, serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Dari pendekatan tersebut dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu, juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah, seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data tersebut tersedia, baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia, kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

1.3 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<http://pesawarankab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://pesawarankab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga juga mencakup juga hal-hal berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

v. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Terhadap data poin ke1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;

- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen LNPRT bersumber dari:

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

v. Metode Penghitungan

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut.

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun

moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota; b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

v. Metode Penghitungan

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku =
Output non pasar - Penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Sumber Data

- Output kategori konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha BPS Kabupaten.
- Laporan keuangan perusahaan.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Hasil survei Matriks PMTB .
- Hasil survei Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- Hasil Survei (*raw data*) Industri Besar Sedang (IBS)

v Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output kategori konstruksi, hasil PDRB, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan

PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

- a. Hasil survei IBS Tahunan
- b. Data komoditas perkebunan;
- c. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- d. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

v Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun

berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan

- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflasi perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa

melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor/import barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- b. Ekspor/import jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Import antar daerah

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan ekspor-impor tahunan, adalah:

- a. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan.
- b. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang; dan
- c. Informasi lalu-lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei.

Data yang tersedia tersebut digunakan sebagai pendukung hasil penghitungan dengan metode tak-langsung, ditambah dengan informasi dari hasil survei matriks arus komoditas (SMAK) yang menggali informasi tentang ekspor-impor antar kabupaten/kota secara sampel. Data yang digunakan dalam metode tak-langsung adalah:

- Struktur input;

- Struktur permintaan akhir menurut komoditas;
- Nilai tambah bruto adh Berlaku;
- Koefisien heterogenitas; dan
- IHPB barang dan IHK jasa-jasa (kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transpor dan komunikasi, serta jasa keuangan).

v Metode Penghitungan

Metode penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota terdiri dari penghitungan untuk data tahunan adh Berlaku dan adh Konstan.

Penghitungan Ekspor/Impor adh Berlaku

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode tak-langsung menggunakan metode *cross hauling*. Metode ini akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa di suatu kabupaten/kota. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap industri/komoditas di suatu perekonomian.

Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) untuk menuju kondisi *demand* dan *supply* yang seimbang di suatu perekonomian. Jika *supply* domestik suatu industri/komoditas di suatu kabupaten/kota melebihi kebutuhan (permintaan antara dan permintaan akhir), maka kabupaten/kota tersebut mengalami surplus dan akan melakukan ekspor. Sebaliknya, jika *supply* domestik komoditas di suatu kabupaten/kota tidak ada atau kurang, maka kabupaten/kota tersebut akan mengimpor (Kronenberg, 2008).

Asumsi yang digunakan dalam metode *commodity balance* adalah kelebihan dan kekurangan *supply* domestik atas *demand*, sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Jika kelebihan *supply* domestik, maka akan melakukan ekspor, sedangkan jika kekurangan *supply* domestik, maka akan mengimpor. Hal ini membuat penghitungan ekspor-impor tersebut belum menangkap aspek lain di dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya, baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan *supply* domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor/impor secara bersama. Untuk mengatasi kelemahan ini, penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota perlu untuk disempurnakan dengan menerapkan metode *cross hauling*.

Metode *cross hauling* berusaha mengatasi kelemahan metode *commodity balance*, dengan mengakomodir kemungkinan suatu kabupaten/kota melakukan ekspor-impor komoditas secara bersamaan. Contoh, suatu kabupaten/kota, selain mengekspor komoditas pertanian ke luar daerah/luar negeri, juga melakukan impor komoditas pertanian yang merupakan output dari luar daerah/luar negeri.

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota menggunakan metode *commodity balance* dilakukan dengan cara sbb:

1. menyusun struktur input masing-masing industri dengan bantuan Tabel I-O yang tersedia;
2. mengalikan NTB menurut industri dengan rasio total input/output terhadap NTB;
3. mengalikan struktur input pada dari poin (1) dengan output dari poin (2). Dari proses ini dihasilkan biaya antara, NTB, dan total input/output dalam Tabel I-O bayangan;
4. menyusun struktur komponen permintaan akhir dengan bantuan Tabel I-O yang ada;
5. mengalikan masing-masing komponen permintaan akhir dengan struktur dari poin (4);
6. menghitung nilai ekspor neto (*trade balance*), yang merupakan selisih output (*supply* domestik) dengan permintaan domestik (antara dan akhir domestik);
7. jika net ekspor bernilai positif, diasumsikan terjadi ekspor, dan jika bernilai negatif diasumsikan terjadi impor;
8. menjumlahkan nilai ekspor dan impor komoditas dari poin (7) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Selanjutnya, untuk menghitung ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode *cross hauling*, dilakukan langkah seperti langkah yang dilakukan dalam metode *commodity balance* di atas, namun hanya sampai langkah ke (6). Penyesuaian dilakukan untuk langkah ke (7), sehingga urutannya menjadi:

1. melakukan langkah (1) s.d (6) seperti pada metode *commodity balance*;
2. menghitung koefisien heterogenitas berdasarkan Tabel I-O data yang tersedia, yaitu *trade volume* dikurangi nilai absolut *trade balance*. Hasilnya dibagi dengan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
3. menghitung besarnya volume perdagangan (*trade volume*), yaitu menjumlahkan nilai absolut *trade balance* dengan hasil perkalian antara koefisien heterogenitas dan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
4. nilai impor setiap komoditas diperoleh dengan mengurangkan *trade volume* dengan *trade balance*, hasilnya dibagi dua;

5. nilai ekspor setiap komoditas diperoleh dengan menjumlahkan *trade balance* dan impor;
6. menjumlahkan nilai ekspor dan impor per komoditas pada langkah (5) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Penghitungan adh Konstan

Penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota adh konstan dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB dan IHK sebagai deflatornya. Deflator untuk barang adalah IHPB, sedangkan jasa adalah IHK.

<http://pesawarankab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN

KABUPATEN PESAWARAN BERDASARKAN

PDRB PENGELUARAN

2012-2016

<http://pesawarankab.bp.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 s.d 2016, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal, banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Secara total, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku (adhb) di tahun 2016 meningkat sebesar 9,76%, yakni dari 11.716 miliar Rupiah menjadi 12.861 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatan ini lebih kecil, yakni dari 9.368 miliar Rupiah menjadi 9.843 miliar Rupiah, atau meningkat sebesar 5,07%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Pesawaran periode 2012 - 2016 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,87%; 6,20%; 5,59%; 5,03%; dan 5,07%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Jika dilihat dari permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode 2012 - 2016, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku meningkat cukup pesat, yakni sebesar 8.730 miliar Rupiah (2012); 9.669 miliar Rupiah (2013); 10.818 miliar Rupiah (2014); 11.716 miliar Rupiah (2015); dan 12.861 miliar Rupiah (2016). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pesawaran pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1 berikut ini.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016

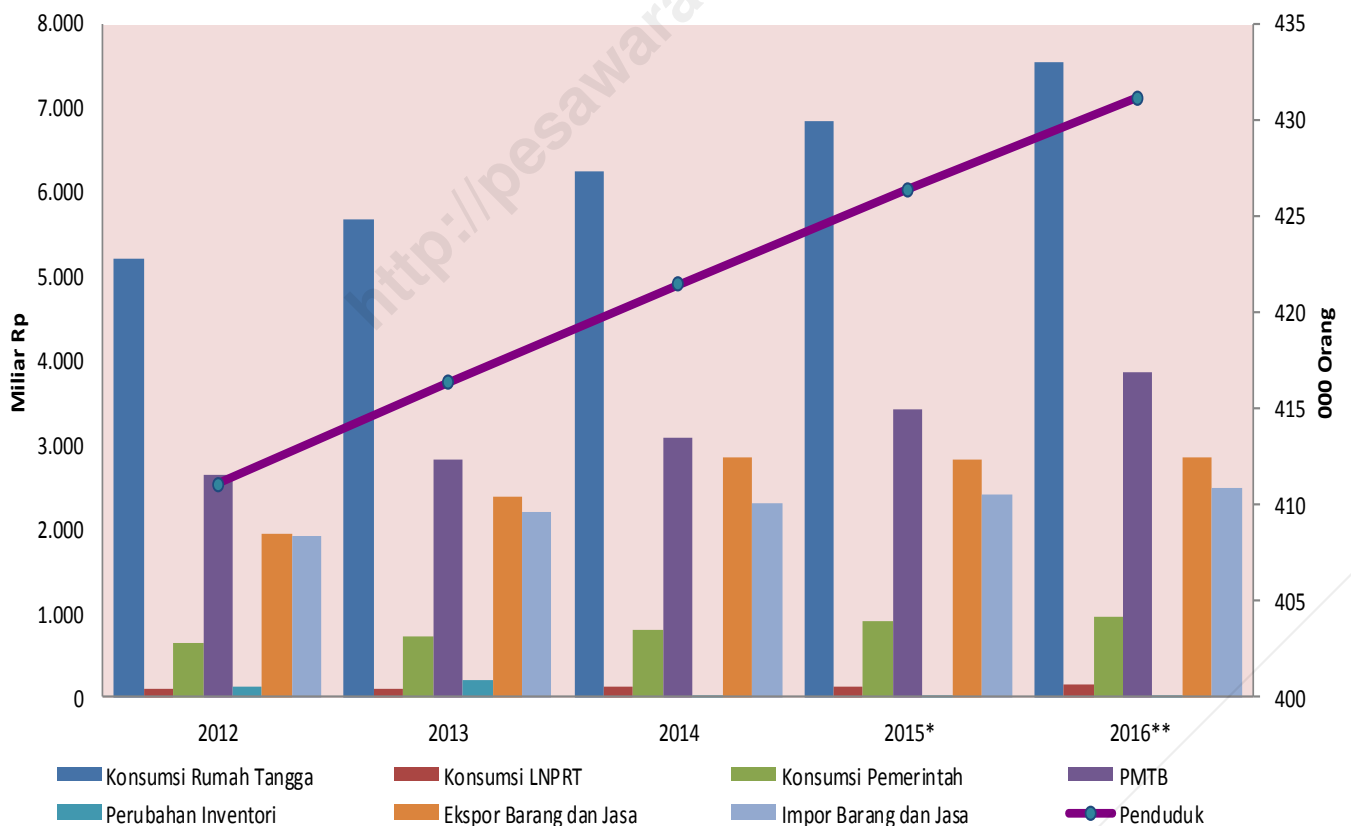
(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5 219	5 686	6 262	6 853	7 545
2. Konsumsi LNPRT	87	98	111	129	147
3. Konsumsi Pemerintah	641	709	797	896	956
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 637	2 813	3 081	3 429	3 859
5. Perubahan Inventori	133	198	4	3	6
6. Ekspor	1 932	2 371	2 855	2 819	2 837
7. Impor	1 918	2 206	2 292	2 413	2 488
PDRB	8 731	9 669	10 818	11 717	12 861

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016



Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya, terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pesawaran pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4 552	4 780	5 061	5 365	5 609
2. Konsumsi LNPRT	80	83	87	95	101
3. Konsumsi Pemerintah	537	567	585	639	662
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 362	2 444	2 587	2 717	2 918
5. Perubahan Inventori	98	44	1	1	2
6. Ekspor	1 885	2 001	2 091	2 059	2 066
7. Impor	1 560	1 471	1 493	1 508	1 514
PDRB	7 954	8 448	8 920	9 369	9 843

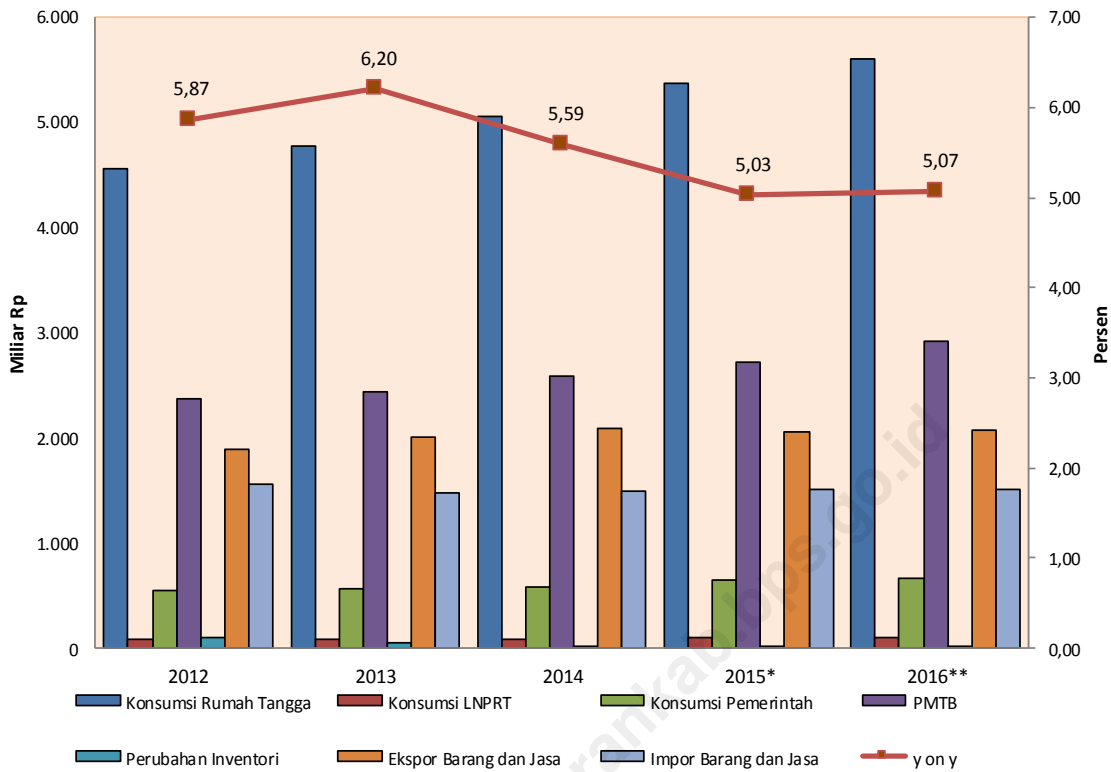
Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Pesawaran meningkat, yakni sebesar 7.954 miliar Rupiah (2012); 8.448 miliar Rupiah (2013); 8.920 miliar Rupiah (2014); 9.369 miliar Rupiah (2015); dan 9.843 miliar Rupiah (2016). Sedangkan dari Grafik 2 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran cenderung melambat, yakni dari 5,87 persen pada tahun 2012 menjadi 5,07 persen pada tahun 2016.

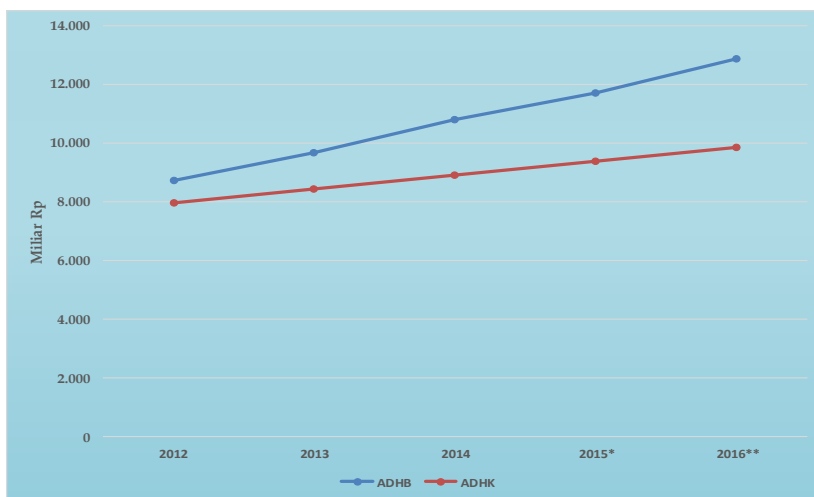
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012 - 2016



Keterangan:

- * : Angka Sementara
- ** : Angka Sangat Sementara

Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016



Keterangan:

- * : Angka Sementara
- ** : Angka Sangat Sementara

Dari Grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,78	58,81	57,89	58,49	58,66
2. Konsumsi LNPRT	1,00	1,02	1,02	1,10	1,14
3. Konsumsi Pemerintah	7,34	7,33	7,37	7,65	7,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,21	29,10	28,48	29,27	30,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	22,12	24,52	26,39	24,06	22,06
7. Impor	21,97	22,82	21,19	20,60	19,35
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

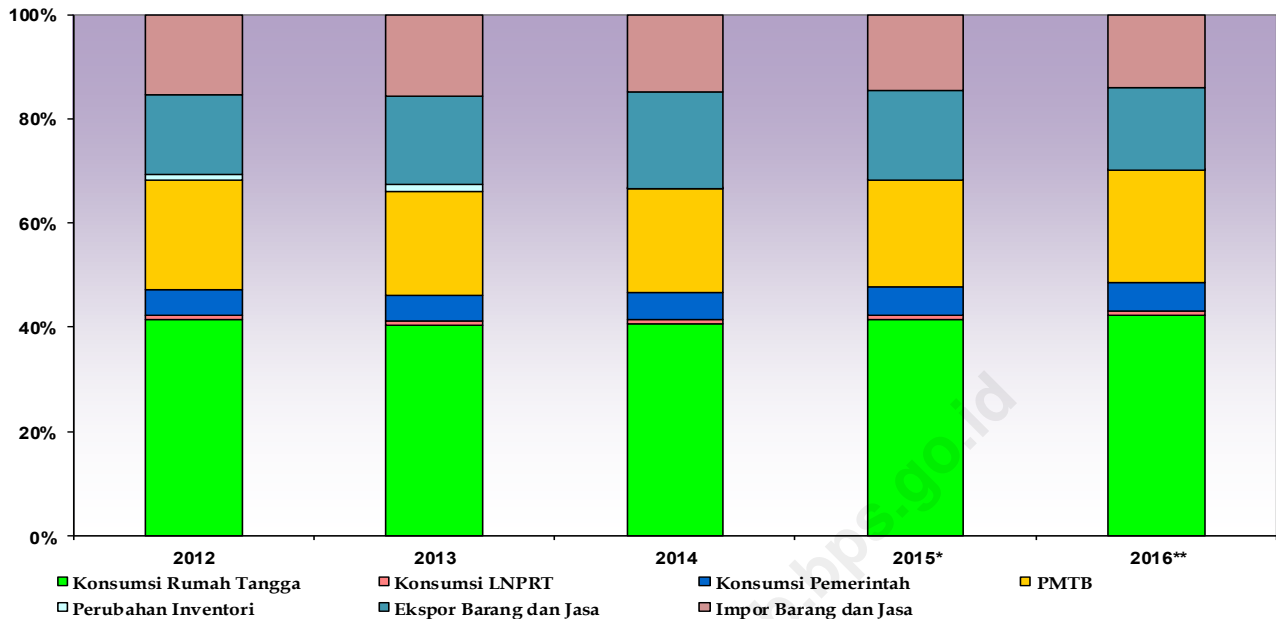
* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2012-2016, PDRB Kabupaten Pesawaran, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 28,48 s.d 30,21 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 22,06 s.d 26,39 persen, tetapi, di sisi lain, komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 19,35 s.d 22,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016



Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 7,33 – 7,65 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2012-2016 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2012-2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,87 persen (2012); 6,20 persen (2013); 5,59 persen (2014); 5,03 persen (2015); dan 5,07 persen (2016). Adapun Grafik 5 berikut menunjukkan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

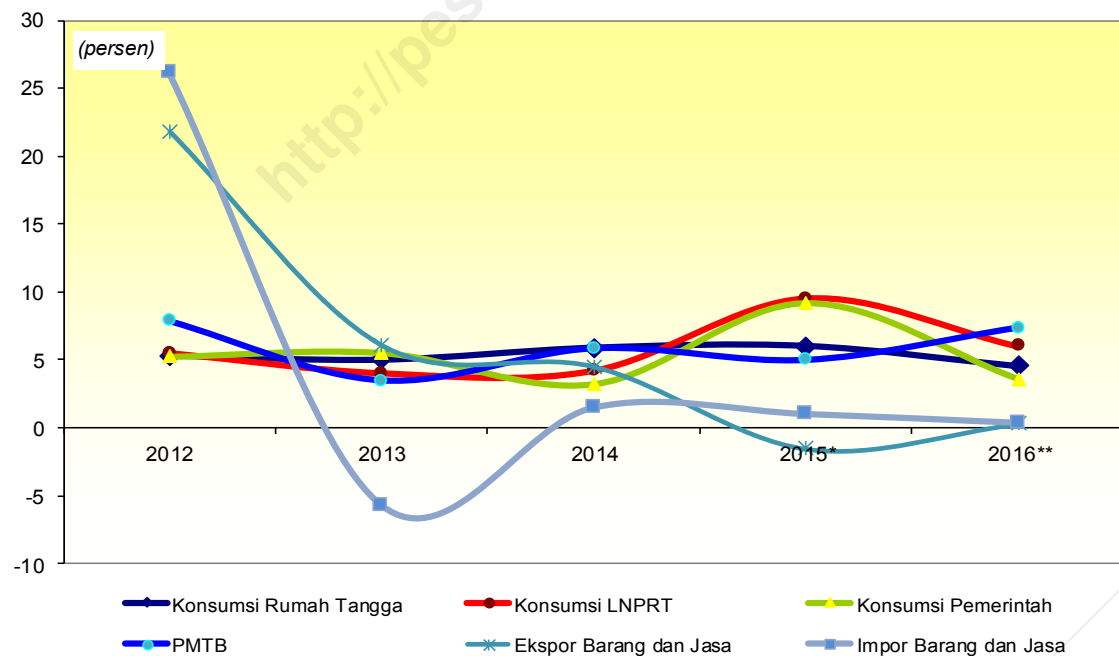
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,31	5,01	5,88	6,01	4,54
2. Konsumsi LNPRT	5,55	4,06	4,24	9,57	6,03
3. Konsumsi Pemerintah	5,23	5,51	3,20	9,20	3,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,88	3,49	5,86	5,00	7,39
5. Perubahan Inventori***	-	-	-	-	-
6. Ekspor	21,86	6,11	4,53	-1,54	0,31
7. Impor	26,12	-5,71	1,48	1,01	0,36
PDRB	5,87	6,20	5,59	5,03	5,07

Keterangan:

- * : Angka Sementara
- ** : Angka Sangat Sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016



Keterangan:

- * : Angka Sementara
- ** : Angka Sangat Sementara

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2012 – 2016, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012 - 2016

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	114,65	118,94	123,73	127,73	134,50
2. Konsumsi LNPRT	108,60	117,89	127,50	136,00	145,30
3. Konsumsi Pemerintah	119,28	125,05	136,25	140,30	144,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111,67	115,10	119,08	126,23	132,25
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	102,45	118,51	136,50	136,88	137,35
7. Impor	122,93	149,95	153,51	160,02	164,37
PDRB	109,76	114,45	121,28	125,06	130,65

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Pesawaran untuk periode 2012 – 2016.

⁶ Indeks perkembangan

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Pesawaran, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pesawaran, maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012 - 2016 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Pada tahun 2012, secara umum, total rumah tangga di Kabupaten Pesawaran menghabiskan PDRB sebesar 5,2 triliun Rupiah setahun untuk membiayai konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb.). Pengeluaran ini terus meningkat hingga tahun 2016, yakni mencapai 7,5 triliun Rupiah setahun. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	5 219	5 686	6 266	6 942	7 545
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4 552	4 780	5 061	5 346	5 609
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	59,78	58,81	57,89	58,49	58,66
Rata-rata konsumsi per- Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB)	12 696	13 656	14 866	16 282	17 497
b. ADHK 2010	11 073	11 481	12 008	12 537	13 008
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi RT	5,31	5,01	5,88	5,61	4,93
b. Perkapita	3,94	3,68	4,59	4,40	3,76
Jumlah penduduk (000 orang)	411	416	421	426	431

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012 – 2016 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung fluktuatif, yaitu 59,78 persen (2012); 58,81 persen (2013); 57,89 persen (2014); 58,49 persen (2015); dan 58,66 persen (2016). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 59,78 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 57,89 persen. Pada tahun 2014, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB menurun disebabkan oleh peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah karena adanya Pemilu.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012, setiap orang di Kabupaten Pesawaran menghabiskan dana sekitar 12,70 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 13,66 juta Rupiah (2013); 14,87 juta Rupiah (2014); 16,28 juta Rupiah (2015); dan 17,50 juta Rupiah (2016). Sementara itu, atas dasar

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 3,68 – 4,59 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 4,59 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Secara umum, pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Namun, pada tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita melambat. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB. Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016⁸

Kelompok Konsumsi	(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	58,52	59,21	58,56	57,93	57,54
b. Pakaian dan Alas Kaki	9,19	8,92	8,87	8,46	8,58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,44	11,29	11,18	11,41	11,26
d. Kesehatan & Pendidikan	3,52	3,46	3,38	3,40	3,42
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,14	12,82	13,83	14,46	14,77
f. Hotel & Restoran	1,04	1,10	1,04	1,10	1,08
g. Lainnya	3,14	3,21	3,13	3,24	3,34
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Sama seperti yang terlihat pada distribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berfluktuatif dari tahun ke tahun, pertumbuhannya pun juga berfluktuatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan kelompok makanan, minuman, dan rokok melambat, yakni hanya sebesar 2,87 persen.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Pertumbuhan kelompok ini merupakan yang terendah dibandingkan kelompok lain pada tahun tersebut. Sementara itu, pertumbuhan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya merupakan kelompok yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 8,90 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016

Kelompok Konsumsi	(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,00	5,52	4,84	5,68	2,87
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,04	3,98	6,56	3,17	3,60
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,75	3,67	7,53	7,10	7,00
d. Kesehatan & Pendidikan	7,42	5,35	6,87	4,61	5,20
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,58	4,32	9,69	8,50	8,90
f. Hotel & Restoran	7,28	7,19	1,58	8,89	5,21
g. Lainnya	7,24	6,06	0,68	5,32	5,93

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 9,39 persen, pada harga kelompok kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pada tahun 2016, pertumbuhan implisit pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terbesar ada pada kelompok pakaian dan alas kaki, yaitu sebesar 7,82 persen dan terendah 1,47 persen kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016⁹

Kelompok Konsumsi	(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,04	4,47	3,91	2,44	6,31
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,94	1,65	2,88	1,10	7,82
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,88	3,65	1,42	4,35	1,47
d. Kesehatan & Pendidikan	9,39	1,51	0,88	5,23	5,17
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,75	1,87	8,33	5,46	3,26
f. Hotel & Restoran	4,59	7,11	2,18	6,18	3,50
g. Lainnya	2,42	5,08	6,90	7,27	7,27

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2012 konsumsi LNPRT sebesar 86,92 miliar Rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 98,20 miliar Rupiah (2013); 110,71 miliar Rupiah (2014); 129,39 miliar Rupiah (2015); dan 146,58 miliar Rupiah (2016). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 5,55 persen (2012), 4,06 persen (2013), 4,24 persen (2014), 9,57 persen (2015), dan 6,03 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 karena adanya Pilkada Bupati Pesawaran.

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Pesawaran 2012 - 2016**

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	86,92	98,20	110,71	129,39	146,58
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	80,04	83,29	86,83	95,14	100,88
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,00	1,02	1,02	1,10	1,14
Pertumbuhan (ADHK 2010)	5,55	4,06	4,24	9,57	6,03

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sementara itu, barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Pesawaran 2012 - 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	641	709	797	896	956
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	537	567	585	639	662
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,34	7,33	7,37	7,65	7,44
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1 559	1 703	1 891	2 102	2 218
b. ADHK 2010	1 307	1 362	1 388	1 498	1 535
Pertumbuhan ¹⁰					
a. Total konsumsi pemerintah	5,23	5,51	3,20	9,20	3,60
b. Konsumsi perkapita	3,86	4,17	1,95	7,95	2,44
Jumlah penduduk (000 orang)	411 077	416 372	421 497	426 389	431 198

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 641 miliar Rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 709 miliar Rupiah (2013), 797 miliar Rupiah (2014), 896 miliar rupiah (2015), dan 956 miliar rupiah (2016). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada tiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan, dari 7,34 persen (tahun 2012) hingga mencapai 7,65 persen (tahun 2015). Sedangkan pada tahun 2016, kontribusi pengeluaran akhir pemerintah menurun menjadi 7,44 persen. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya Pilkada Kabupaten Pesawaran.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, tetapi hal ini tidak diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2012 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1,56 juta Rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1,70 juta rupiah (2013); 1,89 juta Rupiah (2014); 2,10 juta Rupiah (2015); dan mencapai 2,22 juta Rupiah pada tahun 2016.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 1,31 juta Rupiah (2012); 1,36 juta Rupiah (2013); 1,39 juta Rupiah (2014); 1,50 juta Rupiah (2015); dan 1,54 juta Rupiah (2016). Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 3,86 persen (2012); 4,17 persen (2013); 1,95 persen (2014); 7,95 persen (2015); dan 2,44 persen (2016).

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
Konsumsi Pemerintah (Juta Rp)	640 898	708 934	797 137	896 369	956 438
Pertumbuhan riil (ADHK 2010) (%)					
Konsumsi Pemerintah	5,23	5,51	3,20	9,20	3,60
Pertumbuhan indeks harga (%)					
Implisit					
Konsumsi Pemerintah	9,40	4,84	8,96	2,97	2,99

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹¹. Fungsi kapital adalah

¹¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi dua kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung berfluktuasi dari 7,88 persen(2012); 3,49 persen(2013); 5,86 persen(2014); 5,00 persen (2015); dan 7,39 persen (2016). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2013.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2 637	2 813	3 081	3 429	3 859
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2 362	2 444	2 587	2 717	2 918
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	30,21	29,10	28,48	29,27	30,00
Struktur PMTB ¹²					
a. Bangunan					
(<i>Miliar Rp</i>)	1 799	1 909	2 113	2 305	2 518
(%)	68,20	67,87	68,57	67,22	65,25
b. Non Bangunan					
(<i>Miliar Rp</i>)	839	904	968	1 124	1 341
(%)	31,80	32,13	31,43	32,78	34,75
Total PMTB					
(<i>Miliar Rp</i>)	2 637	2 813	3 081	3 429	3 859
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹³ (%)					
a. Bangunan	3,57	3,77	8,08	3,78	5,20
b. Non Bangunan	17,31	2,93	1,54	7,52	11,78
Total PMTB	7,88	3,49	5,86	5,00	7,39

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	133	198	4	3	6
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	98	44	1	1	2

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2012 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 133 miliar Rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar 198 miliar Rupiah. Pada tahun 2014 perubahan inventori turun mencapai 4 miliar Rupiah, tahun 2015 sebesar 3 miliar Rupiah, dan pada tahun 2016 sebesar 6 miliar Rupiah.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Pesawaran, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Kabupaten Pesawaran 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 932	2 371	2 855	2 819	2 837
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 885	2 001	2 091	2 059	2 066
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	22,12	24,52	26,39	24,06	22,06
Pertumbuhan ¹⁴	21,86	6,11	4,53	(1,54)	0,31

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2012-2016 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2012, nilai ekspor barang dan jasa sebesar 1.932 miliar Rupiah meningkat menjadi sebesar 2.371 miliar Rupiah pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014-2016, nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.855 miliar Rupiah; 2.819 miliar Rupiah; dan 2.837 miliar Rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 1.885 miliar Rupiah (2012); 2.001 miliar rupiah (2013); 2.091 miliar Rupiah (2014); 2.059 miliar Rupiah (2015); dan 2.066 miliar Rupiah (2016). Sementara itu, pada periode 2012 s.d 2016, proporsi dalam PDRB justru cenderung fluktuatif berkisar antara 22,06 - 26,39 persen. Proporsi ekspor barang dan jasa tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2016.

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Pesawaran. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya (net ekspor). Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Pesawaran di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pesawaran terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Pesawaran meningkat, atas dasar harga berlaku. Namun, impor barang dan jasa berfluktuasi jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, pada kurun tahun 2012 s.d 2016. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2012 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 21,97 persen dan meningkat menjadi 22,82 persen pada tahun 2013. Pada tahun berikutnya, kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 21,19 persen (2014); 20,60 persen (2015); dan 19,35 persen (2016).

Nilai impor atas dasar harga berlaku yang cenderung meningkat, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 cenderung berfluktuasi disebabkan adanya pengaruh harga pada periode waktu bersangkutan. Perbedaan arah nilai impor barang dan jasa ADHB dan ADHK 2010 menunjukkan bahwa secara volume (kuantitas), barang dan jasa yang diimpor tidak selalu naik. Pada tahun 2012, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 1.918 miliar Rupiah, kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 2.206 miliar Rupiah, 2.292 miliar Rupiah pada tahun 2014, 2.413 miliar Rupiah pada tahun 2015, dan 2.488 miliar rupiah pada tahun 2016.

Tabel 16. Perkembangan Impor Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1 918	2 206	2 292	2 413	2 488
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1 560	1 471	1 493	1 508	1 514
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	21,97	22,82	21,19	20,60	19,35
Pertumbuhan ¹⁵	26,12	(5,71)	1,48	1,01	0,36

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

PENGELUARAN KABUPATEN PESAWARAN

2012-2016

<http://pesawarankab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Pesawaran di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran, dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pesawaran 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	8 731	9 669	10 818	11 717	12 861
- ADHK 2010	7 954	8 448	8 920	9 369	9 843
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	21 238	23 221	25 666	27 478	29 825
- ADHK 2010	19 350	20 289	21 163	21 972	22 828
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2001	4,49	4,85	4,31	3,82	3,90
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	411	416	421	426	431
Pertumbuhan	1,32	1,29	1,23	1,16	1,13

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Pesawaran (sekitar 56 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Pesawaran sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	5 218 861	5 685 874	6 262 368	6 853 132	7 544 644
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1 931 606	2 370 977	2 854 711	2 818 612	2 837 080
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,70	2,40	2,19	2,43	2,66

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,66 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor di Kabupaten Pesawaran selama periode 2012-2016 mengalami fluktuatif. Ratio pada tahun 2012 sebesar 2,70, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 s.d 2014, yaitu berturut-turut menjadi 2,40 dan 2,19. Pada tahun 2015, ratio meningkat kembali menjadi 2,43 dan 2,66 pada tahun 2016. Peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2015 lebih disebabkan karena penurunan nilai ekspor, sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Secara implisit, data tersebut menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Pesawaran digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	5 218 861	5 685 874	6 262 368	6 853 132	7 544 644
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	2 637 459	2 813 151	3 080 935	3 429 206	3 858 502
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,98	2,02	2,03	2,00	1,96

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB di Kabupaten Pesawaran, pada tahun 2012 sebesar 1,98, kemudian bertambah menjadi 2,02 pada tahun 2013 dan 2,03 pada tahun 2014. Di tahun 2015, ratio berkurang menjadi 2,00 dan 1,96 pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena adanya perlambatan nilai investasi, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir, baik berasal dari produk domestik maupun impor, untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, begitu juga dengan proporsinya terhadap PDRB yang semakin mengalami peningkatan.

Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	5 218 861	5 685 874	6 262 368	6 853 132	7 544 644
b. LNPRT	86 923	98 195	110 706	129 392	146 576
c. Pemerintah	640 898	708 934	797 137	896 369	956 438
Jumlah	5 946 682	6 493 003	7 170 211	7 878 893	8 647 658
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	8 730 593	9 668 703	10 817 941	11 716 513	12 860 674
Persentase	68,11	67,15	66,28	67,25	67,24

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar Kabupaten Pesawaran. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara itu, di sisi lain, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Selama periode 2012-2016 ekspor mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Pesawaran, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1 931 606	2 370 977	2 854 711	2 818 612	2 837 080
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	2 637 459	2 813 151	3 080 935	3 429 206	3 858 502
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,73	0,84	0,93	0,82	0,74

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil, maka ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Pesawaran, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	8 730 593	9 668 703	10 817 941	11 716 513	12 860 674
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	1 918 108	2 206 151	2 292 142	2 413 352	2 488 076
Rasio PDRB terhadap Impor	4,55	4,38	4,72	4,85	5,17

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2012-2016 menunjukkan penurunan dari 4,55 (2012) menjadi 4,38 (2013). Namun, di tahun berikutnya meningkat menjadi 4,72 (2014); 4,85 (2015); dan 5,17 (2016). Selama lima tahun terakhir, rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 (5,17). Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Kabupaten Pesawaran, dengan rentang 16 s.d 19 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat sudah bisa dipenuhi sekitar 83 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 10,65 triliun Rupiah (2012) menjadi 15,35 triliun Rupiah (2016).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Pesawaran, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)					
(Juta Rp)	8 730 593	9 668 703	10 817 941	11 716 513	12 860 674
%	81,99	81,42	82,52	82,92	83,79
Total nilai Impor ADHB					
(Juta Rp)	1 918 108	2 206 151	2 292 142	2 413 352	2 488 076
%	18,01	18,58	17,48	17,08	16,21
Total Permintaan Akhir (Juta Rp)	10 648 700	11 874 854	13 110 084	14 129 865	15 348 750
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Di sisi lain, “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar; 8.730 miliar Rupiah (2012); 9.669 miliar Rupiah (2013); 10.818 miliar Rupiah (2014); 11.716 miliar Rupiah (2015); dan 12.861 miliar Rupiah (2016). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1,92 triliun Rupiah (2012); 2,21 triliun Rupiah (2013); 2,29 triliun Rupiah (2014); 2,41 triliun Rupiah (2015); dan 2,49 triliun Rupiah (2016).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran, 2012 – 2016

U r a i a n	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1 931 606	2 370 977	2 854 711	2 818 612	2 837 080
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	1 918 108	2 206 151	2 292 142	2 413 352	2 488 076
Net ekspor (X - M) (Juta Rp)	13 499	164 826	562 569	405 260	349 004
Rasio ekspor thdp Impor	1,01	1,07	1,25	1,17	1,14

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012-2016, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Pesawaran dengan luar Kabupaten Pesawaran selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Pesawaran dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Surplus perdagangan Kabupaten Pesawaran selama periode 2012-2016 adalah sebagai berikut 13,50 miliar Rupiah (2012); 164,83 miliar Rupiah (2013); 562,57 miliar Rupiah (2014); 405,26 miliar Rupiah (2015); dan 349,00 miliar Rupiah (2016).

Rasio ekspor terhadap impor cenderung menurun dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 1,01 bertambah menjadi 1,07 pada tahun 2013, dan 1,25 pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 1,17 dan 1,14 pada tahun 2016.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 25. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Pesawaran 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (juta Rp)	7 954 316	8 447 694	8 920 055	9 368 564	9 843 453
Perubahan (juta Rp)	441 206	493 379	472 361	448 509	474 889
PMTB (ADHK 2010) (juta Rp)	2 361 811	2 444 158	2 587 375	2 716 670	2 917 542
ICOR	5,35	4,95	5,48	6,06	6,14

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR meningkat dari sebesar 5,35 (2012) menjadi 6,14 (2016). Di tahun 2016, untuk meningkatkan satu satuan output PDRB diperlukan investasi sebesar 6,14 satuan. Kenyataan yang terjadi, Kabupaten Pesawaran masih sangat membutuhkan banyak investasi untuk mendongkrak perekonomian Pesawaran. Pesawaran kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, pemanfaatannya masih kurang optimal dikarenakan kurangnya investasi yang masuk di Pesawaran. Investasi di semua sektor seperti : pariwisata, angkutan dan pertanian selain mampu meningkatkan produksi juga dapat menyerap tenaga kerja.

<http://pesawarankab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

<http://pesawarankab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 s.d 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 s.d 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Pesawaran terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<http://pesawarankab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5 218 861	5 685 874	6 262 368	6 853 132	7 544 644
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3 054 061	3 366 656	3 667 405	3 970 039	4 341 535
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	479 611	506 900	555 670	579 583	647 385
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	597 211	641 752	699 871	782 175	849 245
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	183 850	196 611	211 960	233 316	258 143
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	685 950	728 950	866 157	991 087	1 114 482
1.f. Hotel dan Restoran	54 527	62 604	64 982	75 127	81 810
1.g. Lainnya	163 651	182 401	196 324	221 805	252 045
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	86 923	98 195	110 706	129 392	146 576
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	640 898	708 934	797 137	896 369	956 438
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2 637 459	2 813 151	3 080 935	3 429 206	3 858 502
4.a. Bangunan	1 798 797	1 909 348	2 112 720	2 304 942	2 517 760
4.b. Non-Bangunan	838 662	903 803	968 215	1 124 263	1 340 742
5. Perubahan Inventori	132 953	197 724	4 227	3 155	5 510
6. Ekspor	1 931 606	2 370 977	2 854 711	2 818 612	2 837 080
7. Impor	1 918 108	2 206 151	2 292 142	2 413 352	2 488 076
PDRB	8 730 593	9 668 703	10 817 941	11 716 513	12 860 674

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4 552 025	4 780 301	5 061 460	5 365 495	5 609 209
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2 566 075	2 707 630	2 838 549	2 999 709	3 085 749
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	432 865	450 073	479 582	494 765	512 577
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	535 688	555 367	597 159	639 554	684 323
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	158 572	167 050	178 521	186 745	196 456
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	647 428	675 375	740 812	803 801	875 340
1.f. Hotel dan Restoran	51 844	55 574	56 452	61 469	64 672
1.g. Lainnya	159 554	169 231	170 385	179 452	190 093
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	80 041	83 293	86 828	95 141	100 878
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	537 300	566 926	585 068	638 894	661 895
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2 361 811	2 444 158	2 587 375	2 716 670	2 917 542
4.a. Bangunan	1 556 242	1 614 981	1 745 449	1 811 465	1 905 662
4.b. Non-Bangunan	805 568	829 177	841 926	905 204	1 011 880
5. Perubahan Inventori	98 046	43 695	1 103	1 333	2 058
6. Ekspor	1 885 459	2 000 627	2 091 341	2 059 224	2 065 559
7. Impor	1 560 367	1 471 306	1 493 120	1 508 193	1 513 687
PDRB	7 954 316	8 447 694	8 920 055	9 368 564	9 843 453

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	59,78	58,81	57,89	58,49	58,66
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,98	34,82	33,90	33,88	33,76
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,49	5,24	5,14	4,95	5,03
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	6,84	6,64	6,47	6,68	6,60
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,11	2,03	1,96	1,99	2,01
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,86	7,54	8,01	8,46	8,67
1.f. Hotel dan Restoran	0,62	0,65	0,60	0,64	0,64
1.g. Lainnya	1,87	1,89	1,81	1,89	1,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,00	1,02	1,02	1,10	1,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,34	7,33	7,37	7,65	7,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	30,21	29,10	28,48	29,27	30,00
4.a. Bangunan	20,60	19,75	19,53	19,67	19,58
4.b. Non-Bangunan	9,61	9,35	8,95	9,60	10,43
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	22,12	24,52	26,39	24,06	22,06
7. Impor	21,97	22,82	21,19	20,60	19,35
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	57,23	56,59	56,74	54,51	56,98
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,26	32,05	31,82	30,47	31,35
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,44	5,33	5,38	5,03	5,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	6,73	6,57	6,69	6,50	6,95
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,99	1,98	2,00	1,90	2,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,14	7,99	8,31	8,17	8,89
1.f. Hotel dan Restoran	0,65	0,66	0,63	0,62	0,66
1.g. Lainnya	2,01	2,00	1,91	1,82	1,93
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,01	0,99	0,97	0,97	1,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,75	6,71	6,56	6,49	6,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	29,69	28,93	29,01	27,60	29,64
4.a. Bangunan	19,56	19,12	19,57	18,40	19,36
4.b. Non-Bangunan	10,13	9,82	9,44	9,20	10,28
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	23,70	23,68	23,45	20,92	20,98
7. Impor	19,62	17,42	16,74	15,32	15,38
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	12,59	8,95	10,14	9,43	10,09
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	13,44	10,24	8,93	8,25	9,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	11,26	5,69	9,62	4,30	11,70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,85	7,46	9,06	11,76	8,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	17,51	6,94	7,81	10,08	10,64
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,64	6,27	18,82	14,42	12,45
1.f. Hotel dan Restoran	12,20	14,81	3,80	15,61	8,89
1.g. Lainnya	9,83	11,46	7,63	12,98	13,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,39	12,97	12,74	16,88	13,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,13	10,62	12,44	12,45	6,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	13,35	6,66	9,52	11,30	12,52
4.a. Bangunan	11,50	6,15	10,65	9,10	9,23
4.b. Non-Bangunan	17,52	7,77	7,13	16,12	19,26
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	17,17	22,75	20,40	(1,26)	0,66
7. Impor	31,23	15,02	3,90	5,29	3,10
PDRB	9,91	10,75	11,89	8,31	9,77

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,31	5,01	5,88	6,01	4,54
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,00	5,52	4,84	5,68	2,87
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,04	3,98	6,56	3,17	3,60
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	3,75	3,67	7,53	7,10	7,00
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,42	5,35	6,87	4,61	5,20
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,58	4,32	9,69	8,50	8,90
1.f. Hotel dan Restoran	7,28	7,19	1,58	8,89	5,21
1.g. Lainnya	7,24	6,06	0,68	5,32	5,93
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,55	4,06	4,24	9,57	6,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,23	5,51	3,20	9,20	3,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	7,88	3,49	5,86	5,00	7,39
4.a. Bangunan	3,57	3,77	8,08	3,78	5,20
4.b. Non-Bangunan	17,31	2,93	1,54	7,52	11,78
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	21,86	6,11	4,53	(1,54)	0,31
7. Impor	26,12	(5,71)	1,48	1,01	0,36
PDRB	5,87	6,20	5,59	5,03	5,07

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	126,75	138,09	152,09	166,44	183,23
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	130,32	143,66	156,49	169,40	105,44
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	120,11	126,94	139,16	145,15	15,72
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	121,13	130,16	141,95	158,65	20,62
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	132,74	141,96	153,04	168,46	6,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	119,34	126,82	150,70	172,43	193,90
1.f. Hotel dan Restoran	114,98	132,02	137,03	158,42	172,52
1.g. Lainnya	135,28	150,78	162,29	183,36	208,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121,38	137,12	154,59	180,69	204,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	132,87	146,97	165,26	185,83	198,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	133,79	142,71	156,29	173,96	195,73
4.a. Bangunan	124,14	131,77	145,81	159,07	173,76
4.b. Non-Bangunan	160,57	173,04	185,37	215,25	256,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	140,73	172,74	207,98	205,35	206,70
7. Impor	179,89	206,90	214,97	226,34	233,34
PDRB	122,62	135,79	151,94	164,56	180,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	110,55	116,10	122,92	130,31	136,23
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	109,50	115,54	121,12	128,00	131,67
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	108,40	112,71	120,10	123,90	128,36
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	108,65	112,64	121,12	129,72	138,80
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	114,49	120,61	128,90	134,83	141,85
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	112,64	117,50	128,89	139,85	152,29
1.f. Hotel dan Restoran	109,33	117,19	119,04	129,62	136,38
1.g. Lainnya	131,90	139,90	140,85	148,35	157,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	111,77	116,31	121,25	132,86	140,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	111,39	117,53	121,29	132,45	137,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	119,81	123,99	131,25	137,81	148,00
4.a. Bangunan	107,40	111,46	120,46	125,02	131,52
4.b. Non-Bangunan	154,23	158,75	161,19	173,31	193,73
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	137,37	145,76	152,37	150,03	150,49
7. Impor	146,34	137,99	140,03	141,45	141,96
PDRB	111,72	118,65	125,28	131,58	138,25

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	114,65	118,94	123,73	127,73	134,50
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	119,02	124,34	129,20	132,35	140,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	110,80	112,63	115,87	117,14	126,30
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111,48	115,55	117,20	122,30	124,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	115,94	117,70	118,73	124,94	131,40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	105,95	107,93	116,92	123,30	127,32
1.f. Hotel dan Restoran	105,17	112,65	115,11	122,22	126,50
1.g. Lainnya	102,57	107,78	115,22	123,60	132,59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	108,60	117,89	127,50	136,00	145,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	119,28	125,05	136,25	140,30	144,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	111,67	115,10	119,08	126,23	132,25
4.a. Bangunan	115,59	118,23	121,04	127,24	132,12
4.b. Non-Bangunan	104,11	109,00	115,00	124,20	132,50
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	102,45	118,51	136,50	136,88	137,35
7. Impor	122,93	149,95	153,51	160,02	164,37
PDRB	109,76	114,45	121,28	125,06	130,65

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,91	3,75	4,02	3,23	5,31
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,04	4,47	3,91	2,44	6,31
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,94	1,65	2,88	1,10	7,82
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang	5,88	3,65	1,42	4,35	1,47
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9,39	1,51	0,88	5,23	5,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,75	1,87	8,33	5,46	3,26
1.f. Hotel dan Restoran	4,59	7,11	2,18	6,18	3,50
1.g. Lainnya	2,42	5,08	6,90	7,27	7,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,64	8,56	8,15	6,67	6,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,40	4,84	8,96	2,97	2,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,07	3,07	3,46	6,01	4,77
4.a. Bangunan	7,66	2,29	2,38	5,12	3,83
4.b. Non-Bangunan	0,18	4,70	5,50	8,00	6,68
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	(3,85)	15,68	15,18	0,28	0,35
7. Impor	4,05	21,98	2,38	4,24	2,72
PDRB	3,81	4,28	5,96	3,12	4,47

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<http://pesawarankab.bps.go.id>

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Sistem Neraca Nasional*, Jakarta, 2008.
- _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta, 1999.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
- United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
- _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- _____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
- _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
- Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
- Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
- World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 119 Kutoarjo

Gedung Tataan, 35371

Telp. (0721) 94711, e-mail: bps1809@bps.go.id

ISBN 978-602-8329-35-6



9 786026 329356 A